

INVESTOR DAILY MACRO ECONOMICS | 24

MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN

Pemerintah akan Hentikan Bantuan Sosial bagi Perokok

Oleh Arnoldus Kristianus

JAKARTA - Pemerintah berencana hanya memberikan dua program bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kepada masyarakat miskin yang tidak merokok.

Pasalnya, kebiasaan itu dinilai sebagai perilaku yang kontradiktif dengan upaya penanggulangan kemiskinan, mengingat merokok tercatat sebagai penyebab terbesar kedua kemiskinan setelah faktor kenaikan harga pangan.

Ketika menerima (dua) bantuan ini, maka mereka (masyarakat) harus benar-benar memakai untuk keperluan yang dibutuhkan, terutama pangan, apakah beras dan makanan protein," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro saat diskusi Forum Merdeka Barat dengan tema 'Fakta Penurunan Angka Kemiskinan' di Jakarta, Senin (30/7).

akan dihentikan.

"Kalau bisa, sejauh mungkin jangan dipakai untuk membeli rokok. Kalau kebetulan yang bersangkutan perokok sebaiknya konsumsi tersebut dihentikan," ucap Bambang. Ia menjelaskan, peran konsumsi rokok sebagai penyebab kemiskinan sebesar 10% di desa dan 11% di kota. Ia menyarankan, daripada dihabiskan untuk membeli rokok, lebih baik digunakan untuk membeli makanan yang bergizi dan memenuhi karbohidrat serta protein yang cukup.

"Lebih baik dipakai untuk membeli telur, daging ayam, atau kebutuhan yang menunjang kebutuhan makan. Ini penting untuk dijadikan pelajaran agar semua keluarga yang menerima PKH berjanji untuk berhenti merokok, kalau tidak pengeluaran riil mereka akan sangat terganggu," ujarnya.

Diren Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, upaya pengurangan konsumsi rokok ini sudah dijalankan saat Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan. Salah satu program yang

dibahas dalam FDS adalah program kesehatan.

"Dalam kegiatan FDS para pendamping mengatakan bahwa istri perlu mengingatkan suaminya agar berhenti merokok," ujar Harry.

Melalui langkah FDS ini pemerintah ingin mengubah perilaku masyarakat secara persuasif. Dengan melakukan pertemuan rutin setiap minggu didampingi oleh pendamping. Hal ini sejalan dengan instruksi presiden, yakni bila ada masyarakat penerima PKH yang merokok maka Kartu Keluarga Sejahtera-nya akan dicabut. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk memakai uang dari PKH untuk membeli rokok.

"Di keluarga miskin uang untuk membeli rokok bisa dialokasikan untuk membeli susu, makanan, berobat, anak sekolah," ucap Harry.

Kedua Terbesar

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan, BPS memasukkan rokok ini sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Pihaknya melihat kebiasaan merokok ini menjadi pengeluaran kedua terbesar masyarakat setelah bahan makanan. Bila indikator jumlah perokok ini dikeluarkan dari garis kemiskinan maka akan terjadi penurunan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.

"Ke depan kita harus berupaya untuk terus menekan jumlah perokok yang jumlahnya tinggi, tidak hanya untuk penduduk miskin tetapi untuk penduduk tidak miskin," ucap Suhariyanto.



ANTARA FOTO/Umarul Faruq/02/18

Menteri Susi Resmi Pengangkat Kontainer

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) didampingi Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP, Rina (kedua kanan) meresmikan alat pengangkat kontainer (Reach Stacker Kalmar) di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Puspa Agro Kelas I Surabaya II di Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (30/7). Alat tersebut bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan peralatan yang memadai guna meningkatkan standarisasi pelayanan.

Maret 2019, Angka Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 9,3%

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian terkait menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan sampai di angka 9,3% pada Maret 2019. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan pembangunan nasional melalui berbagai program penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2018 mengalami penurunan menjadi 25,95 juta orang atau menjadi 9,82% dari total penduduk Indonesia. Terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 sebesar 26,58 juta orang atau 10,12%.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan, ada tiga faktor dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

Pertama, substansi kebijakan dan program pemerintah yang didasarkan pada cita-cita kemerdekaan, amanat konstitusi, dan visi-misi Nawacita Pemerintah. Kedua, sinergi pemerintah dan lembaga lain seperti Bulog, Himbara, dan TVRI.

"Ada juga, sinergitas pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan perusahaan swasta melalui berbagai modifikasi program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui CSR," ucap Harry dalam Diskusi Forum Merdeka Barat di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Senin (30/7).

Faktor ketiga yaitu pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif. "Perbaikan sistem karena kontrol intensif dilak-

ukan langsung," ucap Harry.

Pihaknya melakukan berbagai upaya yaitu penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tunai Tahap I pada Februari 2018 dan Tahap II pada Mei 2018 telah disalurkan secara tepat waktu sebanyak 97%. Selain itu, penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk verifikasi data. Melalui verifikasi data, penyaluran bantuan akan sampai kepada pihak yang memerlukan bantuan. (ark)



LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. DAN ENTITAS ANAK

WIKATower 1 Lt. 2-4, Jl. D. I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Phone : (021) 8192802 Fax : (021)85903872

Email : sekper@wika-beton.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2018 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2017 (Diaudit) (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Table of Consolidated Financial Position with columns for 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, and detailed line items for Assets (Aset), Liabilities (Liabilitas), and Equity (Ekuitas).

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2018 (Tidak Diaudit) dan 2017 (Diaudit) (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Table of Consolidated Profit and Comprehensive Income with columns for 30 Juni 2018, 30 Juni 2017, and detailed line items for Revenue (Pendapatan), Expenses (Beban), and Profit (Laba).

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2018 (Tidak Diaudit) dan 2017 (Diaudit) (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Table of Consolidated Cash Flows with columns for 30 Juni 2018, 30 Juni 2017, and detailed line items for Operating Activities (Arus Kas dari Aktivitas Operasi), Investing Activities (Arus Kas dari Aktivitas Investasi), and Financing Activities (Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2018 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2017 (Diaudit) (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Table of Consolidated Equity Changes with columns for Modat Diempatkan dan Diotor, Tambahan Modat Diotor, Saldo Laba, and other equity components.

Jakarta, 31 Juli 2018

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

S.E. & O

Direksi

Entitas Anak:

